

Katalog: 9302020.3308
ISSN 2620-469X



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN **2019-2023**

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Katalog: 9302020.3308
ISSN: 2620-469X

<https://magelangkab.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG **2019-2023** MENURUT PENGELUARAN

Volume 7, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran 2019-2023

ISSN : 2620-469X
No Publikasi : 33080.2406
Katalog : 9302020.3308

Ukuran Buku : 21cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 61 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Cover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak:

TM Percetakan

Sumber Ilustrasi:

Pasar Tradisional
(pixabay)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Toto Desanto, S.Si., M.Si

Penyunting:

Fardiana, SP

Penyusun:

Lutfiah Adela Arzie

Pengolah Data:

Lutfiah Adela Arzie

Infografis dan kover:

Yuli Cahyono, S.M

Gambar Kulit:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (i) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), (ii) pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*), dan (iii) pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto Antardaerah (ekspor antardaerah dikurangi dengan impor antardaerah). Data PDRB dalam publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Kota Mungkid, April 2024
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Magelang,



Toto Desanto, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
INFOGRAFIS	1
Ringkasan Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
B. Kegunaan Statistik PDRB	8
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)	13
B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)	16
C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)	18
D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
E. Perubahan Inventori	23
F. Ekspor Impor Barang Dan Jasa	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG, 2019-2023	29
A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran	31
B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	35
C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	38
E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
F. Perkembangan Perubahan Inventori	40
G. Perkembangan Net Ekspor Antardaerah	42

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN	
	TAHUN 2019-2023	45
	A. PDRB (Nominal)	47
	B. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
	C. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	48
	D. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
BAB V	PENUTUP	51
LAMPIRAN	55

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	31
Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	32
Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen).....	33
Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	34
Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)	35
Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magelang, 2019-2023	36
Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2019-2023..	37
Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2019-2023	38
Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2019-2023	40
Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2019-2023	41
Tabel 3.11. Net Ekspor ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010, 2019-2023	43
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magelang, 2019-2023	47
Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kabupaten Magelang, 2019-2023	48
Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magelang, 2019-2023	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)	33
Gambar 3.2. Perbandingan Distribusi PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2019 dan 2023 (Persen)	41
Gambar 3.3. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2019-2023 (Persen)	42

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023.....	57
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023	57
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023.....	58
Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023	58
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023	59
Lampiran 6. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023	60

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

Rp 40.680,39 miliar



MENURUT PENGELUARAN



Pengeluaran
Konsumsi
Rumah Tangga

Rp. 28.620,29 milyar

70,35 %

Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintahan

Rp. 2.827,64 milyar

6,95 %



Pengeluaran
Konsumsi
LNPRT

Rp. 816,80 milyar

2,01 %

Pembentukan
Modal
Tetap Bruto

Rp. 11.086,44 milyar

27,25 %



Perubahan
Inventori

Rp. 512,25 milyar

1,26 %



- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan
- Pengeluaran Konsumsi LNPRT
- Pembentukan Modal Tetap Bruto
- PDRB

Ringkasan Eksekutif

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan performa yang kian membaik. Hal ini terlihat dari total nilai PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Berlaku dan atas dasar harga (ADH) Konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Berlaku selama 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Magelang ADH Berlaku sebesar 32.497,41 miliar rupiah, meningkat menjadi 40.680,39 miliar rupiah di tahun 2023. Meskipun nilai PDRB tahun 2020 sempat mengalami penurunan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tetap terjadi peningkatan sekitar 25,18 persen. Kondisi ini juga berlaku untuk PDRB dengan pendekatan Atas Dasar Harga penghitungan Atas Dasar Harga Konstan, didapatkan nilai PDRB Kabupaten Magelang sebesar 26.211,56 miliar rupiah pada tahun 2023, meningkat 12,72 persen dibanding tahun 2019, yang hanya mencapai 23.253,15 miliar rupiah.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor (E) atau ekspor dikurangi impor. Selama periode 2019-2023, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen), sedangkan konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi sekitar 6 persen saja. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama 2019-2023 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan posisi defisit. Ini berarti, nilai ekspor di Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dari nilai impor.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2019-2023 terlihat fluktuatif, dan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan tercepat dalam kurun waktu tersebut. Adapun indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) menunjukkan nilai positif. Pada 2023, perubahan indeks harga implisit PDRB Kabupaten Magelang mencapai 3,46 persen, sedangkan pada 2019 sebesar 1,72 persen.

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**
- B. Kegunaan Statistik PDRB**

A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

B. KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.
7. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

- A. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT)**
- B. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)**
- C. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)**
- D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**
- E. Perubahan Inventori**
- F. Ekspor Impor Barang Dan Jasa**

A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol dan tembakau
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa

rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

- Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT ADHB. PKRT ADHK 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 (tujuh) jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan; pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PKLNPRRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- b. Mengestimasi PKLNPRRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT ADHB. PKLNPRRT ADHB 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai Pengeluaran Konsumsi akhir Pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni,

pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (KPPN)
- Data realisasi APBD Tahunan (DPPKAD)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

a. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADHB

Secara umum, PKP ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP ADHB} = \text{Output non pasar - penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated*

- asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 - c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi; reklamasi pantai; pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan; serta pencegahan banjir dan erosi).

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Laporan keuangan perusahaan.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang

modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia

dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Sementara untuk ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

E. PERUBAHAN INVENTORI

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu

di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).

- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei;
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, dan ternak dari Dinas Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH Berlaku,

diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan:

- a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai,
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang

diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari daerah
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari daerah
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah:

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan

dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGELANG, 2019-2023

- A. Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Magelang Menurut Pengeluaran**
- B. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga**
- C. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT**
- D. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah**
- E. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**
- F. Perkembangan Perubahan Inventori**
- G. Perkembangan Net Ekspor Antardaerah**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Magelang akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan Perubahan Inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Hal ini terlihat dari PDRB yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku ADHB dan atas dasar harga konstan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir triwulan satu 2020 membuat tahun tersebut mengalami kontraksi. Perekonomian Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sedikit melambat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini digambarkan oleh nilai PDRB beserta pertumbuhannya dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.419,22	23.435,08	24.033,97	26.095,89	28.620,29
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPR	672,08	663,17	691,36	732,36	816,80
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.649,27	2.534,88	2.608,07	2.655,33	2.827,64
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.655,04	9.120,31	9.888,16	10.422,95	11.086,44
5.	Perubahan Inventori	320,70	370,98	352,18	458,24	512,25
6.	<i>Net Ekspor</i>	-4.218,90	-3.662,40	-3.397,43	-2.933,16	-3.183,70
PDRB PENGELUARAN		32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.431,61	40.680,39

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Secara keseluruhan, nilai PDRB Kabupaten Magelang ADHB selama periode 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kabupaten Magelang ADHB sebesar 32.497,41 miliar rupiah di tahun 2019. Nilai ini sedikit mengalami penurunan di tahun 2020, menjadi 32.462,03 miliar rupiah. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir triwulan satu 2020. Namun demikian seiring banyaknya program-program pemerintah untuk pemulihan ekonomi, pada 2021 kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 40.680,39 miliar rupiah.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.376,07	16.146,74	16.327,02	17.069,06	18.097,18
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	429,76	417,02	422,42	428,67	459,83
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.633,21	1.568,62	1.580,64	1.594,23	1.638,59
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.303,16	5.946,33	6.313,79	6.440,02	6.798,28
5.	Perubahan Inventori	282,86	477,86	338,06	424,71	449,32
6.	<i>Net Ekspor</i>	-1.771,92	-1.691,43	-1.320,22	-1.003,50	-1.231,64
PDRB PENGELUARAN		23.253,15	22.661,71	24.953,18	24.953,20	26.211,56

Keterangan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Selain ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dihitung ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang berdasarkan PDRB ADHK 2010 selama kurun waktu 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 3.2 di atas.

Berdasarkan Gambar 3.1, nampak bahwa nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Sementara itu, pada PDRB ADHK pengaruh harga telah ditiadakan.



Keterangan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019 - 2023 (Miliar Rupiah)

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya. Komponen-komponen PDRB menurut pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), serta *net ekspor* (E) atau ekspor dikurangi impor. Adapun distribusi masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,06	72,19	70,32	69,72	70,35
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	2,04	2,02	1,96	2,01
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,15	7,81	7,63	7,09	6,95
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,71	28,10	28,93	27,85	27,25
5.	Perubahan Inventori	0,99	1,14	1,03	1,22	1,26
6.	<i>Net Ekspor</i>	-12,98	-11,28	-9,94	-7,84	-7,82
PDRB PENGELUARAN		100	100	100	100	100

Keterangan: * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, yaitu di atas 70 persen. Sementara itu, PMTB memberikan kontribusi sebesar 27 hingga 30 persen dari total PDRB Kabupaten Magelang. Di sisi lain, konsumsi akhir pemerintah hanya memberi kontribusi tidak lebih dari 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik belum terlalu besar.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar. Pada tahun 2019-2023 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Ini artinya, perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2019 - 2023 cenderung fluktuatif. Pada 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang sebesar 5,30 persen. Akan tetapi, mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen pada tahun 2020. Kondisi ini saat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, terutama pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Perekonomian mulai pulih pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 3,48 persen hingga 5,46 persen pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 5,04 persen di 2023.

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,65	-1,40	1,12	4,54	6,02
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,90	-2,96	1,29	1,48	7,27
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,29	-3,95	0,77	0,86	2,78
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,01	-5,66	6,18	2,00	5,56
PDRB Pengeluaran		5,30	-1,67	3,48	5,46	5,04

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan secara

umum. Hal ini terlihat dari perubahan indeks implisit total yang bernilai positif. Keterangan lebih lanjut mengenai Indeks Implisit tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,19	1,49	1,42	3,86	3,44
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,29	1,69	2,92	4,39	3,97
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,33	-0,38	2,11	0,94	3,61
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,45	0,13	2,11	3,34	0,76
PDRB PENGELUARAN		1,72	1,59	1,74	3,86	3,46

Keterangan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 3.6 menunjukkan hal tersebut, yaitu sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Dalam kurun waktu 2019-2023 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan, baik secara nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan). Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Secara teori, kenaikan jumlah penduduk tersebut akan mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 3.6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	23.419,22	23.435,08	24.033,97	26.095,89	28.620,29
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	16.376,07	16.146,74	16.327,02	17.069,06	18.097,18
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	72,06	72,19	70,32	69,72	70,35
Rata-rata konsumsi perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	18,23	18,05	18,37	19,78	21,51
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	12,75	12,44	12,48	12,94	13,60
Pertumbuhan (% ADHK)					
a. Total Konsumsi RT	4,65	-1,40	1,12	4,54	6,02
b. Perkapita	2,43	4,25	-2,43	0,55	3,98

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Magelang pada periode tahun 2019 - 2023 masih tinggi (di atas 70 persen). Akan tetapi menunjukkan penurunan di tahun 2022, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 69,72 persen, dan kembali meningkat pada tahun terakhir.

Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tersebut tidak sejalan dengan rata-rata konsumsi rumah tangga. Secara umum, rata-rata konsumsi baik per rumah tangga maupun per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, namun sedikit menurun di tahun 2020. Atas dasar harga berlaku, pada 2019 konsumsi akhir rumah tangga per kapita sebesar 18,23 juta rupiah. Hal ini berarti setiap penduduk Kabupaten Magelang rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 18,23 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut sedikit menurun di tahun 2020. Tahun 2021 kembali ada peningkatan dan terus berlanjut hingga menjadi 21,51 juta rupiah di tahun 2023.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir triwulan pertama 2020 mempengaruhi perilaku dan kebiasaan konsumsi rumah tangga. Pembatasan yang diterapkan pemerintah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Apabila dilihat menurut

harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita mengalami pola yang sama dengan harga berlaku selama lima tahun terakhir.

C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT) dalam PDRB menurut pengeluaran masih cukup kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 2 persen saja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi dalam perekonomian suatu wilayah masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), partai politik dan lembaga keagamaan.

Berdasar Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pertumbuhan tahun 2019 cukup tinggi, yang salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran ormas, parpol, LSM dan lembaga lainnya karena adanya pemilihan kepala daerah (bupati dan gubernur) pada tahun 2019. Demikian juga di tahun 2023, peningkatan yang cukup tinggi dipengaruhi oleh biaya kampanye yang dikeluarkan oleh parpol menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif di awal tahun 2024.

Tabel 3.7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	672,08	663,17	691,36	732,36	816,80
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	429,76	417,02	422,42	428,67	459,83
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	2,07	2,04	2,02	1,96	2,01
Pertumbuhan (%ADHK)	13,90	- 2,96	1,29	1,48	7,27

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019, konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan di atas tujuh persen. Akan tetapi, pada 2020 konsumsi LNPRT mengalami kontraksi seperti dialami komponen lainnya, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tahun 2021 kondisinya mulai membaik seiring bangkitnya perekonomian dari pandemi. Di tahun 2023, konsumsi LNPRT kembali mengalami pertumbuhan

di atas 7 persen. Hal ini dipengaruhi pengeluaran parpol yang meningkat selama masa kampanye menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif di awal 2024.

D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada 2019, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 2.649,27 miliar rupiah, yang terus meningkat hingga pada 2019 nilainya mencapai 2.649,27 miliar rupiah. Angka ini sedikit mengalami penurunan di 2020 menjadi 2.534,88 miliar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, juga mengalami pola yang sama. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Dari 8,15 persen pada 2019 hingga 6,95 persen pada 2023.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	2.649,27	2.534,88	2.608,07	2.655,33	2.827,64
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	1.633,21	1.568,62	1.580,64	1.594,23	1.638,59
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	8,15	7,81	7,63	7,09	6,95
Rata-rata konsumsi Pemerintah perkapita/tahun					
a. ADHB (Juta Rupiah)	2,06	1,95	1,99	2,01	2,13
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	1,27	1,21	1,21	1,21	1,23
Pertumbuhan (%ADHK)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,29	-3,95	0,77	0,86	2,78
c. Konsumsi Pemerintah Perkapita	1,89	-4,96	0,20	0,32	1,96

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang secara total menunjukkan peningkatan, diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun

2019 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2,06 juta rupiah dan meningkat pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita mengalami sedikit penurunan dan kembali meningkat pada 2021 sampai dengan 2023.

Pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah secara riil menunjukkan fluktuasi, baik secara keseluruhan maupun per kapita. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2019-2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2023, sebesar 2,78 persen, dan terendah terjadi pada tahun 2020, yang mengalami kontraksi sebesar 3,95 persen. Kondisi yang hampir sama terjadi pada pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023, sebesar 1,96 persen, dan pertumbuhan terendah juga terjadi pada 2020, yang mengalami kontraksi sebesar 4,96 persen.

E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun *riil*.

Tabel 3.9 di bawah ini menjelaskan bahwa selama kurun waktu 2019-2023, baik berdasarkan ADH Berlaku maupun ADH Konstan, nilai PMTB Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan, kecuali pada 2020 yang mengalami kontraksi dan meningkat kembali pada 2021 sampai dengan 2023. Akan tetapi, meskipun tren nominalnya menunjukkan kenaikan, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB terlihat fluktuatif. Pertumbuhan PMTB tertinggi pada 2021 mencapai 6,18 persen, sedangkan yang terendah pada 2020, yang mengalami kontraksi sebesar 5,66 persen.

Tabel 3.9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	9.655,04	9.120,31	9.888,16	10.422,95	11.086,44
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	6.303,16	5.946,33	6.313,79	6.440,02	6.798,28
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	29,71	28,10	28,93	27,85	27,25
Pertumbuhan (%ADHK)	5,01	-5,66	6,18	2,00	5,56

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen *net* ekspor antardaerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi, yang dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	320,70	370,98	352,18	458,24	512,25
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	282,86	477,86	338,06	424,71	449,32
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	0,99	1,14	1,03	1,22	1,26

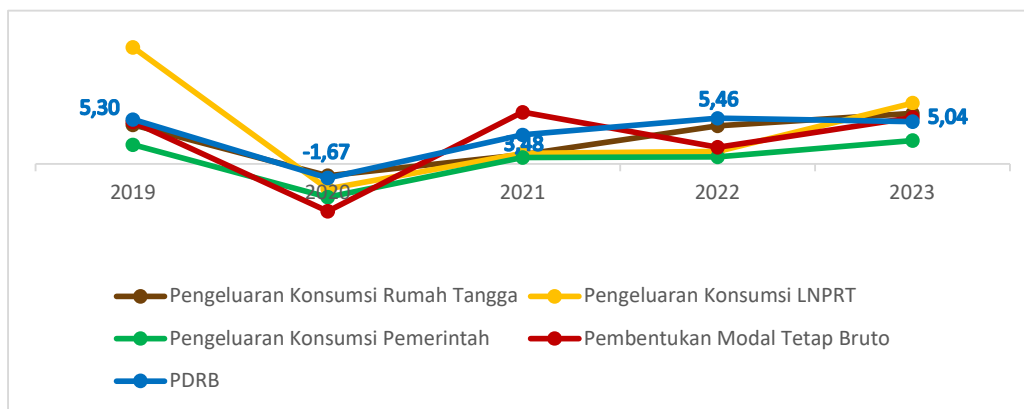
Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara nominal, ADHB untuk komponen perubahan inventori menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada 2019, nominal ADHB mencapai 320,70 miliar rupiah. Nilai tersebut berfluktuasi selama kurun waktu lima tahun terakhir, dan yang tertinggi adalah pada tahun 2023, sebesar 512,25 miliar rupiah. Kondisi sejalan ditunjukkan oleh nominal ADHK. Selama 2019-2023, komponen perubahan inventori menunjukkan tren fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 449,32 miliar rupiah.

Sejalan dengan nominal ADHB, proporsi perubahan inventori terhadap PDRB di Kabupaten Magelang selama periode 2019-2023 juga fluktuatif. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB pada 2019 sebesar 0,99 persen merupakan posisi terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika dicermati, berdasarkan Tabel 3.10, proporsi perubahan inventori tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 1,26 persen.



Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 3.2. Pertumbuhan Beberapa Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Magelang, 2019-2023 (Persen)

G. PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTARDAERAH

Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai ekspor antardaerah dikurangi impor antardaerah. Pada penghitungan ekspor-impor antardaerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antardaerah dan impor antardaerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antardaerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antardaerah lebih besar dari pada impor antardaerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antardaerah menjadi nilai ekspor antardaerah dan nilai impor antardaerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat gambaran ekspor dan impor antardaerah, yaitu ekspor Kabupaten Magelang ke Kabupaten/Kota lain serta impor dari kabupaten/kota lain ke Kabupaten Magelang. Terlihat bahwa nilai ekspor antardaerah selalu lebih kecil dibanding nilai impornya, sehingga net ekspor antardaerah selalu negatif dari tahun ke tahun.

Tabel 3.11. Net Ekspor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor ADHB (Miliar Rupiah)	-4.218,90	-3.662,40	-3.397,43	-2.933,16	-3.183,04
Net Ekspor ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	-1.771,92	-1.691,43	-1.320,22	-1.003,50	-1.231,64

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MAGELANG MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023

- A. PDRB (Nominal)**
- B. Perbandingan Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Terhadap PMTB**
- C. Proporsi Konsumsi Akhir
Terhadap PDRB**
- D. Neraca Perdagangan
(Trade Balance)**

Berbagai indikator ekonomi makro yang seringkali digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021*	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (Miliar Rupiah)	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.431,61	40.680,39
b. ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	23.253,15	22.661,71	24.953,18	24.953,20	26.211,56
PDRB Perkapita					
a. ADHB (Juta Rupiah)	25,30	25,01	26,12	28,37	30,57
b. ADHK 2010 (Juta Rupiah)	18,10	17,61	18,09	18,91	19,70
Pertumbuhan (%ADHK)					
a. PDRB	5,30	-1,67	3,48	5,46	5,04
c. PDRB Perkapita	4,89	-2,70	2,69	4,55	4,17
Jumlah penduduk (ribu)	1.284,63	1.298,19	1.308,20	1.319,56	1.330,66

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

B. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)	23.419,22	23.435,08	24.033,97	26.095,89	28.620,29
Total PMTB (Miliar Rupiah)	9.655,04	9.120,31	9.888,16	10.422,95	11.086,44
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,43	2,57	2,43	2,50	2,58

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama 2019-2023 adalah sebesar 2,50. Hal ini dapat diartikan, penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 2,50 kali lebih besar dibanding untuk PMTB. Nilai ini cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut lebih disebabkan perubahan nilai PMTB yang tidak stabil di kurun waktu tersebut.

C. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Berdasarkan Tabel 4.3, sekitar 80 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Magelang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari 82,29 persen pada 2019 menjadi 79,31 persen pada 2023. Sementara itu, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir memiliki peran relatif kecil, yaitu kurang dari 20 persen.

Tabel 4.3. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magelang, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (Miliar Rupiah)					
a. Rumah Tangga	23.419,22	23.435,08	24.033,97	26.095,29	28.620,29
b. LNPRT	672,08	663,17	691,36	732,36	816,80
c. Pemerintah	2.649,27	2.534,88	2.608,07	2.655,33	2.827,64
Jumlah	26.740,57	26.633,13	27.333,40	29.482,98	32.264,73
PDRB (Miliar Rupiah)	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.449,37	40.680,39
Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB (%)	82,29	82,04	79,98	78,73	79,31

Keterangan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

D. NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Net Ekspor”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2019-2023, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang dengan luar daerah dan antar kabupaten/kota, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magelang selalu dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran uang keluar.

BAB V

PENUTUP

<https://magelangkab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antardaerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nominal PDRB Kabupaten Magelang tahun 2023 ADHB mencapai 40.680,39 miliar rupiah. Dari nilai sebesar itu sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga 70,35 persen, LNPRT 2,01 persen dan pemerintah yang mencapai 6,95 persen. Dengan peranan konsumsi rumah tangga yang sangat dominan, tidak dapat dipungkiri bahwa komponen ini adalah penopang dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang.
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan hal yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Magelang dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Pada kurun waktu tahun 2019-2023 proporsi PMTB atau peranan investasi dalam perekonomian Kabupaten Magelang kurang dari 30 persen.
4. Nilai Net Ekspor Kabupaten Magelang setiap tahun bernilai negatif, yang artinya nilai impor lebih besar dari nilai eksportnya. Secara nominal, defisit ini mengalami fluktuasi dari 4.218,90 miliar rupiah pada 2019 menjadi 3.183,70 miliar rupiah di tahun 2023.
5. Dari seluruh data, indikator dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.

LAMPIRAN

<https://magelangkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Miliar Rupiah

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.419,22	23.435,08	24.033,97	26.095,89	28.620,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	672,08	663,17	691,36	732,36	816,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.649,27	2.534,88	2.608,07	2.655,33	2.827,64
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.655,04	9.120,31	9.888,16	10.422,95	11.086,44
5. Perubahan Inventori	320,70	370,98	352,18	458,24	512,25
6. Net Ekspor	-4.218,90	-3.662,40	-3.397,43	-2.933,16	-3.183,70
PDRB	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.431,61	40.680,39

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Miliar Rupiah

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.376,07	16.146,74	16.327,02	17.069,06	18.097,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	429,76	417,02	422,42	428,67	459,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.633,21	1.568,62	1.580,64	1.594,23	1.638,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.303,16	5.946,33	6.313,79	6.440,02	6.798,28
5. Perubahan Inventori	282,86	477,86	338,06	424,71	449,32
6. Net Ekspor	-1.771,92	-1.691,43	-1.320,22	-1.003,50	-1.231,64
PDRB	23.253,15	22.661,71	24.953,18	24.953,20	26.211,56

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,65	-1,40	1,12	4,54	6,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,90	-2,96	1,29	1,48	7,27
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,29	-3,95	0,77	0,86	2,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,01	-5,66	6,18	2,00	5,56
PDRB	5,30	-1,67	3,48	5,46	5,04

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	Persen				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,06	72,19	70,32	69,72	70,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	2,04	2,02	1,96	2,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,15	7,81	7,63	7,09	6,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,71	28,10	28,93	27,85	27,25
5. Perubahan Inventori	0,99	1,14	1,03	1,22	1,26
6. Net Ekspor	-12,98	-11,28	-9,94	-7,84	-7,82
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang,
2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	143,01	145,14	147,20	152,88	158,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	156,38	159,02	163,67	170,85	177,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	162,21	161,60	165,00	166,56	172,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	153,18	153,38	156,61	161,85	163,08
5. Perubahan Inventori	113,38	77,63	104,18	107,90	114,01
6. Net Ekspor	238,10	216,53	257,34	292,29	258,44
PDRB	139,75	141,97	144,44	150,01	155,20

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Perubahan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Magelang, 2019-2023**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,19	1,49	1,42	3,86	3,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,29	1,69	2,92	4,39	3,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,33	-0,38	2,11	0,94	3,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,45	0,13	2,11	3,34	0,76
PDRB	1,72	1,59	1,74	3,86	3,46

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<https://magelangkab.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://magelangkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno-Hatta No. 04, Kota Mungkid Telp./Fax. (0293) 788143, Kota Mungkid 56511
Homepage: magelangkab.bps.go.id E-mail: bps3308@bps.go.id

ISSN 2620-469X



9 772620 469000